

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Malang

Nomor Registrasi: 35.07-20519-1028



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Home Delivery Service

1.2. Dibuat Oleh

Rois Dwi Fitri Idiasutik (keckromengan.kab.malang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

Kepala Daerah

1.5. Jenis Inovasi

Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatus, sebagai abdi negara yang dalam era baru disebut aparatur sipil negara (ASN). Dimana tugas tersebut tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat. Empat hal tersebut yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini kemudian diperjelas dalam

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 dimana uraian pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan.

Pelayanan publik yang berkualitas dan atau yang bisa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Sedangkan tolak ukur dari standar pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan dan penanganan pengaduan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014.

Definisi dari pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan publik adalah petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Dan penerima layanan adalah perorangan atau kelompok masyarakat dan badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

Pelayanan publik berkaitan erat dengan kemampuan, daya tanggap, ketepatan waktu dan sarana prasarana yang tersedia. Apabila layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna layanan maka dapat dikatakan pelayanan tersebut merupakan pelayanan berkualitas.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kecamatan sebagai penyedia layanan publik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk jasa atau perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan.

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah terkait kondisi geografis wilayah desa, dimana jarak tempuh dari desa ke kantor kecamatan cukup jauh dan memakan waktu.

Membuat sistem distribusi dokumen kepada masyarakat dengan lebih mudah dan tidak lagi memberatkan warga, jarak tempuh wilayah Pemerintahan Desa ke pusat Pemerintahan Kecamatan merupakan salah satu yang menjadi kendala. guna menyikapi dan mengatasi

permasalahan tersebut maka dibangunlah suatu pola dan sistem distribusi dokumen yang lebih efektif dan efisien.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbaiki yang sudah ada dibidang teknologi pelayanan atau menciptakan terobosan atau penyederhanaan dibidang aturan , pendekatan, prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang manfaatnya mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan.

tujuan Inovasi HDS (Home Dilevery Service) adalah untuk meningkatkan pelayanan. Dengan sistem ini nantinya masyarakat akan mendapatkan dokumen dikediaman /tempat tinggal masing - masing, namun demikian prosedur pengajuan serta syarat - syarat administrasi tetap harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dari Inovasi HDS (Home Dilevery Service) adalah menyarakat /warga tidak harus meninggikan aktivitas sehari - hari hanya untuk sekedar mengambil dokumen yang sudah tercetak selain hal tersebut kedekatan staf Pemerintahan Kecamatan dengan warganya bisa lebih terjalin sehingga mampu menampung serta merealisasikan aspirasi yang ada dikalangan warganya

1.11. Hasil Inovasi

Peningkatan Kinerja Pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya sistem HDS (Home Delivery Service)

Dengan berjalannya sistem tersebut nantinya diharapkan akan muncul inovasi lainnya, khususnya terkait bidang pelayanan terhadap masyarakat sehingga fungsi lembaga Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat bisa segera terwujud

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

08-01-2019

1.13. Waktu Implementasi

05-02-2019

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis -**1.16. Kematangan**

89.00

2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	PELAYANAN MASYARAKAT TERKAIT PENDISTRIBUSIAN E-KTP DENGAN SISTEM HOME DELIVERY SERVICE (HDS) KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019, PENETAPAN INOVASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2019-2021
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	PELAYANAN MASYARAKAT TERKAIT PENDISTRIBUSIAN E-KTP DENGAN SISTEM HOME DELIVERY SERVICE (HDS) KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019, INOVASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
3. Dukungan Anggaran	-	Tidak Tersedia
4. Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik	PELAKSANAAN INOVASI, DOKUNETASI KEGIATAN
5. Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali bimtek	BIMTEK INOVASI
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP),

		FOTO KEGIATAN INOVASI
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
10. Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PELAYANAN MASYARAKAT TERKAIT PENDISTRIBUSIAN E-KTP DENGAN SISTEM HOME DELIVERY SERVICE (HDS) KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019
11. Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	MEDIA SOSIAL
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	dibawah 31%	CALL CENTER
13. Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 4 aktor	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	PELAYANAN MASYARAKAT TERKAIT PENDISTRIBUSIAN E-KTP DENGAN SISTEM HOME DELIVERY SERVICE (HDS) KECAMATAN KROMENGAN TAHUN 2019, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
15. Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	MEDIA SOSIAL
16. Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
17. Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang keatas	DOKUMENTASI KEGIATAN, DAFTAR PENERIMA
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, DAFTAR HADIR
19. Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	SOSIALISASI KEGIATAN INOVASI

20.Kualitas Inovasi Daerah

Memenuhi 5 unsur
substansi

Home Delivery Service

Judul Inovasi :
CaKep LiMa
Camat Kepala Desa Dinas/Instansi Peduli Masyarakat

Kromengan merupakan salah satu daerah dari 33 Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Secara astronomis Kecamatan Kromengan terletak diantara 112,2776 sampai 112,3231 Bujur Timur dan 8,0567 sampai 8,0882 Lintang Selatan. Geografi mengacu pada data potensi Kecamatan Kromengan, letak geografi sebagian besar desa di Kecamatan Kromengan adalah dataran dengan topografi sebagian besar desa tergolong dataran. Luas kawasan Kecamatan Kromengan secara keseluruhan adalah sekitar 39,14 km². Seluruh desa di Kecamatan Kromengan berada di luar hutan. Desa terjauh ke kantor Kecamatan Kromengan adalah Desa Jatikerto dan Desa Jambuwer yakni berjarak 7 km. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kromengan adalah sebagai berikut:

-) Sebelah Utara : Kecamatan Wonosari
-) Sebelah Timur : kecamatan Kepanjen
-) Sebelah Selatan : Kecamatan Sumberpucung
-) Sebelah Barat : Kabupaten Blitar

Unit administrasi pemerintahan dibawah kecamatan adalah kelurahan/desa. Setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Pada tahun 2017 Kecamatan Kromengan terbagi habis menjadi 7 desa, 17 dusun, 51 RW dan 234 RT. Dilihat dari komposisinya Desa Ngadirejo memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu sebanyak 4 dusun. Banyaknya jumlah dusun yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbanyak pula. Terbukti jumlah RT dan RW terbanyak di Desa Jambuwer sebanyak 44 RT dan 12 RW. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini tidak akan berhasil apabila desa sebagai satuan terkecil pemerintahan tidak pernah tersentuh pembangunan. Pada tahun 2017 hasil pembangunan di Kecamatan Kromengan telah dapat dirasakan. Hal ini dapat ditengarai dari semua desa di Kecamatan Kromengan yang telah mencapai tingkat swasembada. Hal ini menunjukkan bahwa desa di Kecamatan Kromengan memiliki partisipasi yang baik dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya. Dalam menyelenggarakan pemerintah, perangkat desa mempunyai peranan yang penting dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintah, tugas-tugas pembangunan maupun di dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mengetahui gambaran jumlah perangkat desa, jarak dari kantor desa ke kantor kecamatan di Kecamatan Kromengan.

Register Penduduk, Penduduk Akhir Tahun, Rasio Jenis Kelamin dan Rata-Rata Anggota Keluarga							
Desa/Keluarga	Registrasi penduduk (teratur/tdk teratur/tdk ada)	Penduduk Akhir tahun (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin (%)	Jumlah Keluarga Akhir Tahun (KK)	Rata rata Anggota keluarga (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Slorok	Teratur	2 735	2 843	5 578	96,2	1 538	4
2.Jatikerto	Teratur	4 821	4 713	9 534	102,29	2 691	4
3.Ngadirejo	Teratur	2 430	2 418	4 848	100,5	1 877	3
4.Karangrejo	Teratur	2 859	2 969	5 826	96,36	1 925	3
5.Kromengan	Teratur	3 859	3 869	7 728	99,74	2 514	3
6.Peniwen	Teratur	1 599	1 715	3 314	93,24	1 191	3
7.Jambuwer	Teratur	2 504	2 653	5 157	94,38	2 619	2
Kecamatan Kromengan		20 807	21 178	41 985	98,25	13 905	3

Tujuan Inovasi

Kecamatan sebagai salah satu birokrasi kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota-Provinsi serta Pemerintah Pusat sangat besar peran serta kontribusinya terhadap perkembangan serta kemajuan suatu wilayah.

Pengertian inovasi pelayanan publik menurut Permen PANRB No 30 Tahun 2014 adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sesuai Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Kecamatan tidak henti-hentinya berupaya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.

Seiring terus berjalannya roda pemerintahan maka tuntutan akan perbaikan pelayanan disemua lini mutlak adanya, dimasa kepemimpinan sebelumnya Kecamatan Kromengan juga telah menorehkan prestasi baik tingkat kabupaten ataupun satu level di atasnya. Pada periode kepemimpinan sekarang muncul satu inovasi dengan nama **CaKep LiMa**. Harapan besar disandarkan pada lahirnya inovasi tersebut dimana tujuan intinya menuju masyarakat Kromengan yang makmur dan sejahtera secara berkeadilan.

Adapun cakupan yang ada dalam **CaKep LiMa** terdiri dari 5 (lima) bidang peduli kepada masyarakat antara lain:

1. Perekonomian Masyarakat.

Bidang perekonomian merupakan urat nadi keberlangsungan hidup masyarakat disuatu wilayah. Kecamatan Kromengan dengan posisi geografis dikaki Gunung Kawi mempunyai tekstur tanah yang sangat subur, terutama peruntukan sebagai lahan pertanian. Tuntutan perkembangan suatu wilayah seringkali berimbas pada pergeseran fungsi areal lahan, namun hal ini tetap harus dikontrol agar nantinya dampak negative yang ditimbulkan bisa diminimalisir. Terdapat beberapa produk unggulan disetiap desa diwilayah Kecamatan Kromengan, seperti Desa Jambuwer dengan produk khas kopi nya, Desa Karangrejo sebagai daerah produsen jamu nya serta masih banyak lagi potensi dibebeberapa desa lainnya. Wadah bagi usaha kecil menengah sangat diperlukan, hal ini sebagai jembatan penghubung kepada pihak terkait maupun sebagai sarana transformasi perkembangan baik teknologi maupun regulasi yang ada. Dalam berbagai event ditingkat kecamatan seperti dalam agenda giat Sinergitas yang dihadiri pakar dari Legislatif seringkali tema UMKM diangkat, hal ini tidak terlepas dari pengembangan potensi wilayah melalui forum tersebut. Dalam giat tersebut tentunya juga dihadiri dinas ataupun instansi terkait yang siap menjembatani guna kemajuan unit usaha ditingkat masyarakat agar lebih dikenal baik diwilayah provinsi Jawa Timur maupun tingkatan yang lebih lua lagi.

Bidang peternakan juga memiliki potensi yang sangat besar diwilayah kecamatan Kromengan, hampir semua warga yang berprofesi sebagai petani mempunyai peliharaan hewan ternak. Bidang pariwisata juga memerlukan pemikiran khusus agar kedepan mampu menjadi sejajar dengan wilayah kecamatan lainnya. Kedepan kerjasama dengan perusahaan besar dapat kiranya diinisiasi sebagai harapan guna kemajuan usaha berbasis kerakyatan, seperti pabrik produsen kopi kemasan, pabrik kemasan makanan siap saji dan sebagainya. Bidang peternakan lain yang juga berpotensi untuk berkembang yakni peternakan ayam pedaging, hamper disemua desa diwilayah Kecamatan Kromengan terdapat kandang peternakan ayam pedaging yang tentunya dengan produktifitas yang konstan dan terdistribusi kewilayah Malang Raya.

2. Pendidikan Seni Budaya dan Kepariwisataan Masyarakat

Pendidikan dan Seni Budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari inovasi **CaKep LiMa**, dimana peran serta berbagai pihak dalam memajukan pendidikan dan seni sangatlah penting. Dalam bidang pendidikan di kecamatan Kromengan telah ada berbagai inovasi sebelumnya, harapan besar pada periode

selanjutnya akan semakin lebih meningkat perkembangan keberhasilan bidang pendidikan. Dalam bidang seni banyak juga potensi yang bisa dikembangkan, diantaranya seni topeng kayu di Desa Jambuwer, seni batik rakyat dan juga kesenian tari. Kesenian tari serta topeng kayu sendiri merupakan yang tertua di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini perlu kiranya terus dilestarikan khususnya bagi kaum muda milenia agar tidak semakin tergerus oleh perkembangan zaman.

Pembinaan lainnya yang telah dilaksanakan yakni melalui giat PKK tingkat kecamatan dengan mengembangkan batik ecoprint, hal ini merupakan suatu kreatifitas baru dilingkup wilayah kecamatan Kromengan. Kedepan harapannya masyarakat khususnya para ibu rumah tangga mampu lebih mengembangkan batik ecoprint tidak hanya pada media kain saja, namun bisa mengaplikasikan pada media kerajinan lain seperti sepatu, tas, perlengkapan rumah tangga dan sebagainya. Hal ini tentunya jika dikelola dengan baik bukan tidak mungkin akan turut menopang perekonomian keluarga yang akan juga memperbaiki kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan Kromengan.

Dengan kondisi geografis yang brada dileheng Gunung Kawi maka potensi Kecamatan Kromengan dari sisi pariwisata juga sangat besar untuk dikelola dan nantinya mampu menjadi sejajar dengan wilayah kecamatan lain yang telah maju dan berkembang seperti halnya Kecamatan Pujon. Hal ini kiranya peran serta berbagai pihak khususnya masyarakat yang tentunya paham akan kondisi wilayah yang bisa diangkat sebagai lokasi wisata.

3. Kesehatan Masyarakat

Pandemi Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung telah meluluhlantakkan sendi kehidupan masyarakat didunia. Kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang harus terjamin disuatu wilayah. Pemerintah kecamatan dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten serta pemerintah pusat tidak bisa terlepas dari tanggungjawab terkait kesehatan masyarakatnya. Kerja keras semua pihak dimasa pandemi ini sangatlah penting, khususnya terkait target vaksinasi suatu wilayah. Tanpa adanya sinergitas berbagai pihak maka target tersebut akan sangat sulit tercapai. Beberapa hal dilakukan pemerintah kecamatan sebagai wujud keberpihakan terkait penanganan vaksinansi, diantaranya melakukan koordiansi dan evaluasi bersama-sama dengan muspika serta lintas sektor guna mempercepat serta memfasilitasi kegiatan vaksinasi di wilayah kecamatan Kromengan. Meskipun disbanding denga wilayah kecamatan lainnya kecamatan Kromengan mempunyai wilayah dan jumlah desa yang relatif kecil, namun kesadaran masyarakat sangatlah penting sebagai kunci sukses terlaksananya vaksinasi. Beberapa kendala yang ada telah dapat diantisipasi oleh berbagai pihak, seperti halnya pada penduduk yang masuk kategori usia renta maupun orang dengan kebutuhan khusus, pihak petugas baik dari nakes maupu dari desa berkunjung kekediaman warga tersebut untuk melaksanakan vaksinasi. Dalam berbagai forum keagamaan juga tak lepas peran serta para pemuka agama untuk memberikan pemahaman akan pentingnya vaksin bagi masyarakat secara individu maupun secara komunal.

4. Infrastruktur Masyarakat

Wilayah kecamatan Kromengan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar disisi sebelah barat merupakan jalur alternatif yang cukup ramai. Jalur poros yang sering dilewati guna mengangkut hasil pertanian serta peternakan dari dan keluar wilayah Kromengan selama ini dirasa masih terlalu sempit. Seringkali kendaraan yang mengangkut komoditi baik yang keluar maupun masuk kewilayah Kromengan mengalami kendala karena hal tersebut. Dalam berbagai forum tentunya telah diusulkan terkait pelebaran badan jalan mulai dari pertigaan Desa Slorok sampai jalan poros Dusun Rekesan Desa Jambuwer.

Guna mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas baik barang mapupun warga, maka kedepan pihak kecamatan berinisiasi untuk mengupayakan proses pelebaran jalan dimaksud dengan system swadaya. Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan tersebut nantinya mampu meningkatkan pelayan kepada mobilitas warga yang

keluar, masuk maupun yang melintasi wilayah kecamatan Kromengan. Dan hasil bumi di wilayah Kromengan dapat didistribusikan dengan lancar ke berbagai daerah lainnya.

5. Lingkungan Hidup Sekitar Masyarakat

Lingkungan hidup yang lestari sepatutnya diupayakan oleh semua pihak, bencana yang akhir-akhir ini banyak menimpa warga masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Malang tentunya juga tidak terlepas dari ulah kita semua. Seorang warga pada beberapa waktu lalu menjadi korban tanah longsor, lokasi kejadian berada di Desa Bangelan Kecamatan Wonosari yang berbatasan dengan Dusun Krantil Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan. Hal ini tentunya mengingatkan kita akan pentingnya kelestarian alam sekitar. Beralihnya fungsi suatu wilayah seiring berkembangnya suatu daerah memang tidak dapat dipungkiri, kawasan penyangga, kawasan hijau, kawasan pertanian dan juga areal konservasi seringkali berubah menjadi daerah pemukiman, peternakan maupun areal wisata. Hal ini berdampak pada terjadinya beberapa kejadian bencana yang sangat massif. Beberapa waktu lalu kita juga dikejutkan dengan banjir bandang di wilayah Bumiaji Kota Batu yang juga merembet ke wilayah Kabupaten Malang. Alih fungsi lahan menjadi isu yang sangat krusial untuk segera diselesaikan guna meminimalisir dampak negatif seiring dengan berlangsungnya bencana hidrometrologi di wilayah Negara ini. Salah satu giat yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan adalah penghijauan di Desa Jambuwer tepatnya di wilayah wisata terpadu Jowaran dan Desa Karangrejo, hal ini sebagai pilot project yang nantinya mampu ditindaklanjuti ditingkat desa. Dengan demikian pemahaman pentingnya pelestarian lingkungan dapat ditingkatkan khususnya pada masyarakat kecamatan Kromengan.

Dalam hal pelaksanaan program tersebut khusus ditingkat wilayah pemerintah Kecamatan Kromengan melibatkan seluruh staf serta jajaran muspika di wilayah kecamatan tersebut. Masyarakat ditingkat bawah sebagai obyek keterlangsungan program dalam perjalanannya didampingi oleh inisiator/ pihak staf kecamatan. Dan diharapkan dengan intensitas pembinaan secara berkala nantinya diharapkan muncul kader-kader baru di setiap wilayah, guna pengembangan wilayah layanan program tersebut.

Dalam hal penguatan kelembagaan juga diperlukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang lebih tinggi dalam hal ini OPD terkait serta pucuk pimpinan tertinggi di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang. Dengan demikian program secara organisasi mampu berjalan serta dari sisi penganggaran juga bisa disupport oleh pemerintah kabupaten.

Piagam Penghargaan sebagai Peserta
"LOMBA KAMPUNG TANGGUH Sak- RT KABUPATEN MALANG TAHUN 2022"
Dalam Rangka Hari Jadi ke- 1262 Kabupaten Malang



Sertifikat sebagai NOMINATOR 10 BESAR LOMBA ANUGERAH DESA TERBAIK
TIK KABUPATEN MALANG 2022

